

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Akuntabilitas Program Kemandirian Desa Berbasis *Smart village*: Studi Kasus Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri

Muhammad Dwi Nurfaishal^{1*)}, Muhammad Akbar Maulana² Inrinofita Sari³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Jl. Raya Jakarta KM 5 No. 6,
Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten, 42183

Email: ¹dosen03014@unpam.ac.id, ²dosen02927@unpam.ac.id, ³dosen03013@unpam.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Send 15/01/2024

Received 22/01/2024

Accepted 23/01/2024

Abstract

This study aims to analyze the accountability of the village independence program in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Digital transformation and management innovation in the technology era offer opportunities for BUMDes to optimize the economic function of the village through more transparent, efficient, and participatory governance. This study uses a qualitative approach with a case study method at BUMDes Tirta Mandiri, Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency, Central Java Province. The results of the study indicate that the application of the principle of accountability of the village independence program in the management of BUMDes, such as openness of information related to legal certainty, processes, policies, and income generating. This is expected to increase public trust, encourage the sustainability of BUMDes business units, understand problems that occur in society, and improve the quality of life of the community to achieve village independence. In addition, the use of technology in the form of a digital platform in financial management and BUMDes services, especially business units owned such as the tourism sector, building management, village shops, and village study tours allow for integration between accountability and public service innovation.

Keywords: BUMDes Management, Accountability, Digital Transformation, Income Generating.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas program kemandirian desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Transformasi digital dan inovasi manajemen di era teknologi menawarkan peluang bagi BUMDes untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi desa melalui tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas program kemandirian desa dalam pengelolaan BUMDes, seperti keterbukaan informasi terkait kepastian hukum, proses, kebijakan, dan income generating. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong keberlanjutan unit usaha BUMDes, memahami masalah yang terjadi di dalam masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk menwujudkan kemandirian desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam bentuk platform digital dalam manajemen keuangan dan layanan BUMDes khususnya unit usaha

yang dimiliki seperti sektor pariwisata, pengelolaan gedung, toko desa, dan studi wisata desa yang memungkinkan adanya integrasi antara akuntabilitas dan inovasi pelayanan publik.

Kata Kunci: *Pengelolaan BUMDes, Akuntabilitas, Transformasi Digital, Income Generating.*

*)Penulis Korespondensi

E-mail : dosen03014@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Smart village adalah sebuah konsep strategis yang telah diterapkan di berbagai negara sebagai bentuk upaya penyetaraan pembangunan yang berbasis teknologi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya secara inklusif (Faisal and Suharjito, 2021). Sistem pemerintahan demokratis di seluruh dunia saat ini mendorong pertumbuhan inklusif dengan memberikan akses dan pengelolaan sumber daya yang merata kepada seluruh warga Negara (Harahap and Harahap, 2023). Komponen kunci dalam penerapan *smart village* melibatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan melalui solusi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan (Limaye *et al.*, 2016).

Di Indonesia, implementasi konsep *smart village* menjadi representasi pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan SDM untuk mendorong perkembangan di daerah pedesaan (Aditya and Ramdani, 2025). Proses ini mencakup kemampuan desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi (*sensing*), memahami akar penyebabnya (*understanding*), dan mengelola sumber daya yang tersedia (*controlling*) secara efektif dan efisien (Sulistyowati *et al.*, 2021). Dengan pendekatan ini, penerapan *smart village* tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tetapi juga memotivasi mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan (*community engagement and motivation for participation*) (Yanti, 2024).

Pada dasarnya, *smart village* merupakan inovasi berbasis pengetahuan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dan alam untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan (Muzaqi and Tyasotyaningarum, 2022). (Fitriasari, 2023) menjelaskan bahwa *smart village* merupakan bagian integral dari pengembangan wilayah pedesaan yang terhubung dengan sistem regional dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, penerapan *smart village* diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi tepat guna (Nasution, Delima and Prasetyo, 2024). Penerapan Teknologi tidak hanya mempercepat proses pembangunan tetapi juga memfasilitasi konektivitas antara pedesaan, perkotaan, dan pembangunan nasional secara terpadu dan berkelanjutan (Tia Subekti and Damayanti, 2019).

Akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi elemen kunci dalam mendukung kemandirian desa di Indonesia. Peran BUMDes sebagai instrumen penggerak ekonomi desa tidak hanya mencakup aktivitas ekonomi, tetapi juga memuat tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat (Hidayat, Wismaningtyas and Sujatmiko, 2024). Hal ini menuntut adanya tata kelola yang baik, transparansi, dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul, terutama dalam hal efisiensi dan partisipasi masyarakat (Fadri and Fil, 2024).

Transformasi digital telah menjadi katalis dalam pengelolaan BUMDes di era modern (Herry Yulistiyono, 2025). Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang besar bagi BUMDes untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,

baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun pelayanan kepada masyarakat (Anam, 2024). Teknologi memungkinkan terciptanya sistem yang lebih efisien, seperti pencatatan keuangan berbasis aplikasi, *platform* layanan daring, serta integrasi data untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan (Yusman, Putra and Sinaga, 2024).

Implementasi transformasi digital dalam pengelolaan BUMDes tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan besar, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya infrastruktur teknologi, dan resistensi terhadap perubahan (Fristin and Dwinugraha, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat.

Studi ini berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam program kemandirian desa melalui pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok. Desa Ponggok telah menjadi contoh nyata keberhasilan dalam memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan sumber pendapatan baru melalui unit usaha pariwisata, pengelolaan gedung, dan toko desa (SUHAELA, 2022). Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan BUMDes dan bagaimana teknologi berkontribusi terhadap peningkatan kinerja unit usaha desa.

Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan BUMDes mencakup berbagai aspek, seperti transparansi informasi, keterlibatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi (Oci, Wahyudi and Al-Ra'zie, 2023). Transparansi informasi menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana dana desa dan pendapatan BUMDes dikelola (Pribadi *et al.*, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas (Sadjiarto, 2000). Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan program BUMDes (Huda, Suwaryo and Sagita, 2020).

Akuntabilitas juga erat kaitannya dengan *income generating* atau kemampuan BUMDes dalam menciptakan pendapatan. BUMDes yang mampu menghasilkan pendapatan secara konsisten dapat menjadi model pengelolaan yang tidak hanya mandiri secara finansial tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Nugroho *et al.*, 2023). Dalam hal ini, teknologi memainkan peran strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan pengelolaan unit usaha tercatat dengan baik.

BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten menjadi contoh menarik karena keberhasilannya dalam mengimplementasikan *platform digital* untuk mendukung pengelolaan BUMDes. Digitalisasi ini mencakup akuntabilitas penunjang kemandirian desa, hingga pemanfaatan media sosial untuk promosi unit usaha desa. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes yang memberi harapan agar Desa Ponggok akan semakin mandiri (SuHaeLa, 2022).

Konteks pengelolaan BUMDes juga mencakup pemahaman terhadap tantangan-tantangan lokal, seperti resistensi masyarakat terhadap perubahan dan kesenjangan teknologi antara daerah yang berbeda (Wulandari and Lestari, 2024). Tantangan ini memerlukan pendekatan yang adaptif dan inklusif, di mana teknologi tidak hanya dilihat sebagai alat tetapi juga sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat (Zamzami and Maulina, 2023). Integrasi antara akuntabilitas dan penerapan *digital platform* menjadi strategi utama dalam

menciptakan BUMDes yang berdaya saing. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur teknologi, dan komitmen terhadap transparansi adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas program kemandirian desa dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

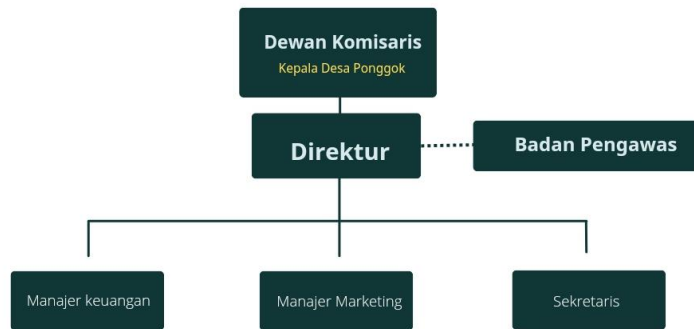
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai akuntabilitas program kemandirian desa dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*dept-in interview*) yang dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan langsung terkait pengelolaan dan akuntabilitas BUMDes Tirta Mandiri. Metode pengumpulan data selanjutnya adalah melalui teknik dokumentasi dengan melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan, peraturan desa, notulen rapat, dan dokumen lain yang relevan. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi individu atau pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kemandirian desa yang dilaksanakan oleh BUMDes Tirta Mandiri. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tiga model analisis data interaktif yaitu reduksi data dengan proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang lebih terfokus pada tujuan penelitian; penyajian data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau visualisasi lainnya untuk mempermudah pemahaman dan analisis; penarikan kesimpulan dan Verifikasi Kesimpulan awal yang dihasilkan dari analisis diverifikasi melalui triangulasi data dan refleksi untuk memastikan validitas dan keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Akuntabilitas Kepastian Hukum

Ranah integritas dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Struktur organisasi BUMDes Tirta Mandiri terdiri atas Dewan Direksi dan karyawan. Dewan Direksi mencakup jabatan Direktur, Sekretaris, Manajer Keuangan, serta Manajer Pemasaran, sementara karyawan bertugas melaksanakan operasional berbagai unit usaha. Untuk memastikan prinsip akuntabilitas yang mencakup aspek kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum, pengelolaan BUMDes ini dilakukan melalui koordinasi rutin dengan Kepala Desa Ponggok dan Badan Pengawas. Kepala Desa, yang secara *ex-officio* bertindak sebagai Dewan Komisaris BUMDes Tirta Mandiri, memegang peran penting dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, pengelolaan organisasi dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.



Gambar 1. Struktur Jajaran Komisaris, Pengawas, dan Direksi BUMDes Tirta Mandiri

Sumber: Data Diolah oleh Penulis, 2024

Sebagai entitas usaha yang bertanggung jawab mengelola potensi ekonomi desa, BUMDes Tirta Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Transparansi diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur, sedangkan akuntabilitas tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil, yang didasarkan pada landasan hukum yang jelas serta selaras dengan kepentingan masyarakat desa. Dengan pendekatan ini, BUMDes Tirta Mandiri tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan desa yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan koordinatif antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan krusial dalam mendukung efektivitas pengelolaan BUMDes. Dalam konteks Desa Ponggok, Kepala Desa, yang bertindak sebagai Dewan Komisaris, bertanggung jawab memberikan arahan strategis serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas BUMDes. Peran Kepala Desa tidak hanya memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan visi dan misi pembangunan desa, tetapi juga memperkuat legitimasi atas berbagai langkah strategis yang diimplementasikan. Lebih jauh, komunikasi yang terstruktur antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berkontribusi dalam meminimalisir potensi konflik serta mendorong terciptanya sinergi positif dalam pengelolaan dan pengembangan usaha desa.

Jumlah pengelola BUMDes Tirta Mandiri saat ini mencapai 78 orang, yang seluruhnya merupakan warga Desa Ponggok. Dalam operasionalnya, BUMDes Tirta Mandiri menerapkan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat. Pendekatan ini diwujudkan melalui diskusi kelompok dan musyawarah desa untuk menetapkan prioritas program serta unit usaha yang akan dikembangkan. Strategi partisipatif ini tidak hanya memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap BUMDes, tetapi juga memastikan bahwa setiap usaha yang dijalankan selaras dengan kebutuhan serta potensi lokal. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam mendukung keberlanjutan usaha yang berorientasi pada visi jangka panjang.

Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri menempatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Dewan Direksi secara proaktif menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan operasional unit usaha. Program tersebut mencakup pelatihan di bidang manajemen keuangan, pelayanan pelanggan, serta

pemasaran digital. Dengan pendekatan ini, BUMDes Tirta Mandiri tidak hanya berorientasi pada optimalisasi hasil usaha, tetapi juga berkomitmen pada penguatan kompetensi SDM sebagai pilar utama keberhasilan lembaga.

BUMDes Tirta Mandiri menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Dalam menjalankan unit usahanya, termasuk pengelolaan sumber daya air di Ponggok, BUMDes ini secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan air bersih. Langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional BUMDes, tetapi juga memastikan perlindungan sumber daya air bagi kepentingan generasi mendatang. Mempertahankan integritas yang tinggi, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, BUMDes Tirta Mandiri telah berhasil menjadi salah satu model pengelolaan BUMDes yang sukses di Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dalam pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga dalam peningkatan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat Desa Ponggok secara keseluruhan. Strategi pengelolaan yang inklusif, berbasis pada norma hukum yang berlaku, dan berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan, menjadi faktor kunci yang mendasari kesuksesan BUMDes Tirta Mandiri.

Akuntabilitas Proses

BUMDes Tirta Mandiri telah membuktikan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaannya di tingkat desa. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi tidak hanya menjadi pedoman operasional, tetapi juga menjamin keberlanjutan dari berbagai program yang dilaksanakan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan melibatkan Badan Pengawas dalam setiap tahapan proses monitoring dan evaluasi. Peran Badan Pengawas sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan BUMDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta mencerminkan kebutuhan masyarakat desa.

Keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri tidak hanya bergantung pada mekanisme monitoring internal, tetapi juga pada kualitas koordinasi yang dijalinnya dengan berbagai pihak eksternal. Dalam beberapa tahun terakhir, BUMDes ini telah menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah lembaga, seperti institusi keuangan, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini memberikan BUMDes akses terhadap pendampingan teknis, pembiayaan, serta peluang untuk pengembangan usaha baru. Sinergi yang terwujud dalam kemitraan tersebut tidak hanya berperan dalam peningkatan kapasitas BUMDes, tetapi juga memperluas dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Desa Ponggok.

Pengelolaan berbasis data menjadi aspek yang sangat krusial dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, BUMDes telah mengimplementasikan sistem pelaporan digital yang memungkinkan integrasi data secara lebih efektif. Sistem ini memberikan kemudahan dalam memantau kinerja unit usaha secara *real-time*, sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan berdasarkan informasi yang valid. Penerapan sistem informasi yang canggih ini turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi potensi kesalahan dalam proses administrasi, sehingga dapat menciptakan pengelolaan yang lebih optimal dan akuntabel.

Dalam perspektif jangka panjang, BUMDes Tirta Mandiri senantiasa berinovasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam pembangunan

desa. Salah satu inisiatif strategis yang saat ini sedang dikembangkan adalah diversifikasi usaha yang mencakup sektor pariwisata, layanan publik, serta industri kreatif. Tujuan dari diversifikasi ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, BUMDes Tirta Mandiri tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan desa, tetapi juga pada penguatan kemandirian desa secara menyeluruh.

Keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri dalam menerapkan model pengelolaan berbasis partisipasi dan transparansi telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Ponggok. Namun, perlu ditekankan bahwa pencapaian ini sangat tergantung pada komitmen yang kuat, kapasitas SDM, serta dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan BUMDes Tirta Mandiri, pelatihan serta pendampingan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama. Pendekatan ini akan memungkinkan BUMDes untuk terus berinovasi dan berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

BUMDes Tirta Mandiri telah menjalin kolaborasi dengan sektor swasta, salah satunya dengan perusahaan Aqua, yang memanfaatkan sumber mata air dari Desa Ponggok untuk diproses menjadi air minum kemasan. Desa Ponggok sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil air baku berkualitas tinggi, yang berasal dari mata air di lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Selain itu, BUMDes Tirta Mandiri juga telah bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) 46 dalam upaya meningkatkan investasi dan pengelolaan keuangan yang berasal dari unit usaha yang dikelola.

Melalui pengelolaan yang terstruktur, transparan, dan inovatif, BUMDes Tirta Mandiri telah berhasil menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat berperan sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Keberhasilan ini menegaskan urgensi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif serta berdaya saing.

Akuntabilitas Program

BUMDes Tirta Mandiri dan Pemerintah Desa Ponggok memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dan strategis. BUMDes Tirta Mandiri memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan aset Desa Ponggok dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan desa. Sebaliknya, Pemerintah Desa Ponggok berfungsi sebagai pelaksana yang menjalankan program-program pembangunan serta kegiatan desa yang didanai oleh pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes Tirta Mandiri. Pembagian fungsi ini tidak hanya memberikan kejelasan dalam perencanaan target dan hasil, tetapi juga memperkuat sinergi antara kedua entitas tersebut dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Berdasarkan Laporan Keuangan BUMDes Tirta Mandiri tahun 2023, pada tahun tersebut, BUMDes Tirta Mandiri berhasil menyumbang pendapatan sebesar 14,2 milyar untuk Desa Ponggok yang berasal dari berbagai unit usaha yang dikelola.

Seluruh unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Tirta Mandiri telah memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang berkontribusi pada peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan operasional serta memperluas daya saing di pasar yang lebih kompetitif. Melalui pengelolaan yang terstruktur dan efektif, unit-unit usaha tersebut mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan desa, mendukung tercapainya tujuan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri dalam mencapai target pendapatan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Desa Ponggok. Selain berperan dalam mendukung berbagai program pembangunan desa, BUMDes ini juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendorong pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, BUMDes Tirta Mandiri telah menjadi model praktik terbaik yang dapat dijadikan referensi dan diterapkan di desa-desa lain di Indonesia (Malaikosa *et al.*, 2024).

Integrasi antara peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pengelolaan aset desa dengan Pemerintah Desa Ponggok sebagai pelaksana program menghasilkan sinergi yang efisien dan produktif. Melalui pendekatan kolaboratif ini, setiap pendapatan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat Desa Ponggok, sekaligus memperkuat kontribusi desa dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Zahrosa, Maharani and Amam, 2021).

Akuntabilitas Kebijakan

BUMDes Tirta Mandiri telah mengoperasikan empat unit usaha utama yang telah berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT). Unit-unit usaha tersebut meliputi:

Tabel 1. Unit dan Fokus Usaha BUMDes Tirta Mandiri yang telah Berbadan Hukum

Unit Usaha Berbadan Hukum	Fokus Usaha
Sumber Umbul Ponggok	destinasi wisata air utama berbasis potensi sumber daya alam lokal
Kampung Ponggok Ciblon	destinasi wisata edukasi berbasis masyarakat
Kedung Sumber Panguripan	berfokus pada konservasi dan ekowisata air
Sumber Banyu Panguripan	menyediakan layanan studi banding dan edukasi manajemen BUMDes

Sumber: Data Diolah oleh Penulis, 2024

Setiap unit usaha memiliki sistem pengelolaan yang dirancang secara terstruktur sesuai dengan Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang terus berlangsung hingga saat ini. Sistem tersebut mencakup pelaporan keuangan, manajemen operasional, dan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk mekanisme penggajian pegawai. Adanya sistem ini memungkinkan setiap unit usaha untuk melaksanakan operasionalnya dengan cara yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Model akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes dibagi dalam tiga kategori utama, yaitu akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), akuntabilitas keluar (*outward accountability*), dan akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*).

Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja kepada Kepala Desa Ponggok, yang secara otomatis menjabat sebagai Dewan Komisaris BUMDes. Pelaporan tersebut dilakukan secara teratur setiap bulan, mencakup evaluasi hasil operasional, pencapaian target keuangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing unit usaha. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan BUMDes berjalan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Desa Ponggok.

Akuntabilitas eksternal (*outward accountability*) ditujukan kepada semua pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun kepada masyarakat secara umum. Salah satu bentuk utama dari akuntabilitas ini diwujudkan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan setiap tahun. Dalam forum tersebut, laporan mengenai pengelolaan dan hasil capaian BUMDes disampaikan dengan cara yang terbuka kepada masyarakat desa dan mitra eksternal. Unit usaha Sumber Banyu Panguripan, yang mengkhususkan diri pada layanan studi banding, berperan sebagai media yang signifikan dalam menyampaikan pencapaian dan keberhasilan BUMDes kepada desa-desa lain yang bermaksud mempelajari pengelolaan BUMDes yang berlandaskan pada konsep akuntabilitas *smart village*.

Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*) menitikberatkan pada pentingnya transparansi internal dalam pengelolaan BUMDes. Sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi, Direktur BUMDes memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai seluruh aspek operasional kepada Dewan Komisaris dan seluruh karyawan. Praktik transparansi ini tidak hanya berfungsi untuk membangun kepercayaan di antara para pengelola, tetapi juga untuk memperkuat partisipasi aktif seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Peran *Smart village Accountability* dalam Pengelolaan BUMDes

Penerapan konsep akuntabilitas *smart village* oleh BUMDes Tirta Mandiri telah menjadi salah satu faktor unggul dalam pengelolaan desa yang berbasis pada modernisasi. Konsep ini mengintegrasikan pemanfaatan teknologi serta sistem pelaporan yang inovatif guna meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi. Sebagai contoh, unit usaha Sumber Banyu Panguripan menyediakan platform edukasi dan kegiatan studi banding yang tidak hanya berfungsi sebagai media berbagi pengetahuan, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan tambahan. Dengan demikian, akuntabilitas yang diterapkan oleh BUMDes tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Penerapan sistem akuntabilitas yang terstruktur telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BUMDes Tirta Mandiri. Pendekatan akuntabilitas vertikal memastikan keselarasan antara operasional dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh desa. Sementara itu, akuntabilitas horizontal memperkuat kepercayaan masyarakat Desa Ponggok terhadap pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri serta meningkatkan transparansi dalam hubungan dengan mitra eksternal. Selain itu, akuntabilitas internal memperkuat terciptanya lingkungan kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif dalam tubuh BUMDes Tirta Mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam program kemandirian desa melalui pengelolaan BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat keberlanjutan unit usaha desa. Studi kasus pada BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi terkait aspek kepastian hukum, proses kebijakan, dan pengelolaan pendapatan memberikan landasan yang kokoh untuk tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Akuntabilitas dalam pengelolaan tidak hanya menciptakan kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan keterlibatan warga desa dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat ikatan sosial dan rasa kepemilikan terhadap unit usaha desa Ponggok. Pemanfaatan

teknologi digital dalam bentuk platform manajemen keuangan dan layanan BUMDes telah menghadirkan inovasi yang signifikan. Teknologi ini memungkinkan pengintegrasian berbagai sektor usaha, seperti pariwisata, pengelolaan fasilitas desa, toko desa, dan studi wisata desa Ponggok, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan teknologi, BUMDes dapat mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan secara lebih transparan, sehingga mendukung pengawasan internal maupun eksternal. Di sektor pelayanan publik, digitalisasi memungkinkan pengelolaan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menciptakan nilai tambah dalam pemberian layanan berbasis inovasi.

Pengelolaan BUMDes yang berbasis prinsip akuntabilitas dan didukung oleh transformasi digital telah terbukti mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Ponggok. Upaya ini tidak hanya relevan untuk meningkatkan pendapatan desa tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian desa di era modern. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara tata kelola yang akuntabel, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama dalam memperkuat ekonomi desa yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Aditya, I. and Ramdani, R. (2025) 'Penerapan Smart Government Dalam Mengembangkan Inovasi Smart Village Di Desa Gunung Putri', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1).
- Anam, M. K. (2024) 'Transformasi Digital Keuangan BUMDes Mata Bangsa Desa Wisata Rotan Trangsan', *JEKIN-Jurnal Teknik Informatika*, 4(3), pp. 420–430.
- Fadri, Z. and Fil, S. (2024) 'Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik', *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.
- Faisal and Suharjito (2021) 'Smart Village Design using Enterprise Architecture Framework Model', in *2021 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)*. IEEE, pp. 212–217.
- Fitriasari, E. T. (2023) 'Akselerasi Kota dan Desa Cerdas Berkelanjutan', *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, 4(1), pp. 45–56.
- Fristin, Y. and Dwinugraha, A. P. (2023) 'Model Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), pp. 67–75.
- Harahap, A. F. R. and Harahap, A. M. (2023) 'Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), pp. 769–776.
- Herry Yulistiyono, Ms. (2025) *Inovasi dan Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal: Bunga Rampai Memperkuat Daya Saing IKM, BUMDes, dan Pariwisata di Era Digital*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hidayat, Y., Wismaningtyas, T. A. and Sujatmiko, S. (2024) 'Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes): Studi pada BUMDes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang', *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), pp. 14–27.
- Huda, H. A., Suwaryo, U. and Sagita, N. I. (2020) 'Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa

- Talagasari Kabupaten Karawang)', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), pp. 539–556.
- Limaye, R. *et al.* (2016) 'Smart village planning framework using extenics theory', in *2016 10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA)*. IEEE, pp. 105–109.
- Malaikosa, Y. M. L. *et al.* (2024) 'Penguatan Kapasitas Potensi BUMDes melalui Literasi Digital dan Pemanfaatan Media Sosial', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), pp. 72–82.
- Muzaqi, A. H. and Tyasotyaningrum, B. (2022) 'Village Community Empowerment Model in Smart Village Perspective (Study on Village Communities in Jombang Regency)', *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10(1), pp. 42–53.
- Nasution, M. Z., Delima, I. D. and Prasetyo, E. (2024) 'Implementasi Smart Village Melalui Sistem Smart Desa Digital Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek Kab. Tangerang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), pp. 752–776.
- Oci, Y., Wahyudi, H. and Al-Ra'zie, Z. H. (2023) 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Adhikari*, 2(4), pp. 443–456.
- Pribadi, U. *et al.* (2023) 'Digitalization of Bumdes: Strengthening Institutions and Developing Business Units of Agung Sejahtera Sumberagung Bumdes Based on Village Potential', in *Proceeding International Conference of Community Service*, pp. 156–163.
- Sadjiarto, A. (2000) 'Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan', *Jurnal akuntansi dan Keuangan*, 2(2), pp. 138–150.
- SUHAELA, U. (2022) 'PENGARUH KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT MENENGAH DESA BARAMBANG KECAMATAN SINJAI BORONG'. UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN.
- Sulistiyowati, F. *et al.* (2021) 'Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggungharjo DIY (Utilization of Sistem Informasi Desa (SID) to Realize Smart Village in Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta)', *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 23(2), pp. 213–226.
- Tia Subekti and Damayanti, R. (2019) 'Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang', *Journal of Public Administration and Local Governance*.
- Wulandari, G. P. M. and Lestari, N. P. N. E. (2024) 'Transformasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Era Digital', *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), pp. 263–281.
- Yanti, D. Y. (2024) 'PELAKSANAAN SMART VILLAGE NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF SMART GOVERNANCE DI DESA KEMUNING KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR', *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), pp. 748–764.
- Yusman, Y., Putra, R. R. and Sinaga, I. (2024) *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital*. Serasi Media Teknologi.
- Zahrosa, D. B., Maharani, A. D. and Amam, A. (2021) 'Performa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Lumajang', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(3), pp. 935–949.

Zamzami, Z. and Maulina, R. (2023) 'Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG)', *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 16(1), pp. 16–29.